

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

*Ferdiansyah, Verdi “ Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Provinsi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan 62/G/2013/PTUN-JKT) diakses melalui lib.ui.ac.id)*

*M. Bambang Suryoningprang, Suradi, Sonhaji “faktor-faktor yang mempengaruhi besaran upah minimum di jawa tengah melalui suatu analisis komparasi (studi kasus kota semarang dan kabupaten demak)” , Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016*

*Parlindungan Marpaung, Madin Silalah, Paskah Wirawan Daeli “penerapan upah minimum propinsi (ump) dari dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara terhadap perusahaan-perusahaan swasta” 164jurnal governance opinion , volume 4 nomor 1, tahun 2019 (oktober) ; 164-176*

*Wirahyoso, Bambang, “ Upah Minimum bagi Buruh dan strategi perjuangan serikat pekerja/ serikat Buruh”, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 7, No. 1, ( 1 Februari 2002).*

*Zulfan, Kasturi, “Kajian Yuridis Tentang Penetapan Upah Tenaga Kerja Pada Perusahaan di Indonesia”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Diakses melalui repository.usu.ac.id*

### 2. Buku

*Albert, M. & Hahnel, R. 2005. Traditional Welfare Theory, (diakses: 4-4-2018).*

*Budiyono, 2007. Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Perlindungan Buruh, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*

- Effendi, Sofian, dkk. 1990. Study Implikasi Sosial Peledakan Penduduk Usia Muda. Yogyakarta: PPK UGM dan Kantor Menteri Negara KLH*
- Gernion, Bernard; Odero, Alberto; Guido Horacia, ILO. 2000. Principles Concerning The Right To Strike, International Labour Office. Geneva*
- Hadi, S. 1990. Metodologi Riset, Yogyakarta: Andi Offset Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.*
- Holley, William H.; Jennings, Kenneth M., The Labour Relations Process, Sixth Edition, The Dryden Press HarcourtBrace College Publishers, Fort WorthPhiladelphia.*
- Jogiyanto. 2005. "Metode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman". Yogyakarta: BPFE*
- Kertonegoro, Sentanoe. 1999. Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit) ..... Yayasan Tenaga Kerja Indonesia*
- Muhammad, Abdulkadir. 1980. Hukum Perikatan. Bandung:*
- M. Hadjon, Philipus. 2005. Hukum Administrasi. Surabaya: Universitas Airlangga*
- Nickel, James W. 1996. Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Refleksi atas Deklarasi Universal Hak Asasi ManusiaPT.Gramedia Pustaka Utama*
- Rusli, Hardijan, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Subekti, R. 1979. Aneka Perjanjian. Bandung*
- Starr, Gerald. 1981. Minimum Wage Fixing, International Labour Office Geneva*
- Soepomo, Iman. 1982 "Pengantar Hukum Perburuhan", Djambatan: Cetakan Kelima*
- Subekti, R. & Tjitrosudibio R. 1983. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita*
- Soedibyo. 1984. "Berbagai Jenis Kontrak Kerja" . Jakarta: Pradnya Paramita*

- Satrio J. 1992. Hukum Perjanjian. Jakarta: Inter Masa*
- Soeprapto, R. 1997. Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*
- Suwarto. 2003. "Hubungan Industrial Dalam Praktek". PT. Raja Grafindo Persada Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia*
- Soekanto, Soerjono. 2006. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: Universitas Indonesia Press*
- Winarya, Adisubrata. Surya. 1999. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Yogyakarta: Ganesha*
- Widjaya, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Rajawali Press*

### **3. Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Himpunan Peraturan dan Pedoman Kesepakatan Kerja Bersama, Proyek Pengembangan Hubungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pusat TA.1989/1990*
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Di Bidang Ketenagakerjaan, Jilid I, II dan III serta Suplemen, PT. Iwins*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian lepas, Borongan dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum*

*Peraturan Menakertrans Nomor: Kep-266/men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum*

*Peraturan Presiden Nomor: 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Konvensi ILO yang Diratifikasi Indonesia, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja bekerjasama dengan ILO Jakarta, 1999*

*Permen Nomor 32 Tahun 2008, Lembaga Kerjasama Bipartit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang*

*Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*

*Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.*